

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang pokok bagi negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. UUD 1945 mengamanatkan khususnya dalam Pasal 33 Ayat 4, penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut *Global Competitiveness Index*, yakni penilaian tingkat kompetitif negara-negara di dunia yang diselenggarakan oleh *World Economics Forum* tiap satu tahun sekali, salah satunya pasar tenaga kerja, Indonesia mengalami penurunan peringkat dari 82 pada tahun 2018 menjadi peringkat ke-85 pada tahun 2019, jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura berada di peringkat ke-1, Malaysia menduduki peringkat ke-20, dan Thailand duduk di peringkat ke-46 (*World Economics Forum*, 2019). Pasar tenaga kerja merupakan pilar ke-8 dalam *Global Competitiveness Index*, di mana pasar tenaga kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas suatu negara sehingga dapat meningkatkan output barang/jasa suatu negara dan sebaliknya. Persaingan ekonomi global semakin ketat ke depannya dan dinamika kebijakan perdagangan luar negeri dari waktu ke waktu mengharuskan Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global agar tidak terpuruk dan termasuk juga usaha untuk keluar dari nominasi negara berkembang di dunia. Salah satu pihak yang mengambil peran dalam hal ini yaitu pemerintah.

Kehidupan manusia secara langsung dipengaruhi oleh pengangguran. Menganggur dapat menurunkan standar kehidupan dan tekanan psikologis yang dialami oleh orang yang menganggur. Kehidupan yang dialami seseorang yang menganggur akan mengalami kesulitan secara ekonomi. Pendapatan yang dihasilkan dari bekerja diandalkan untuk mempertahankan standar hidup, dan ada

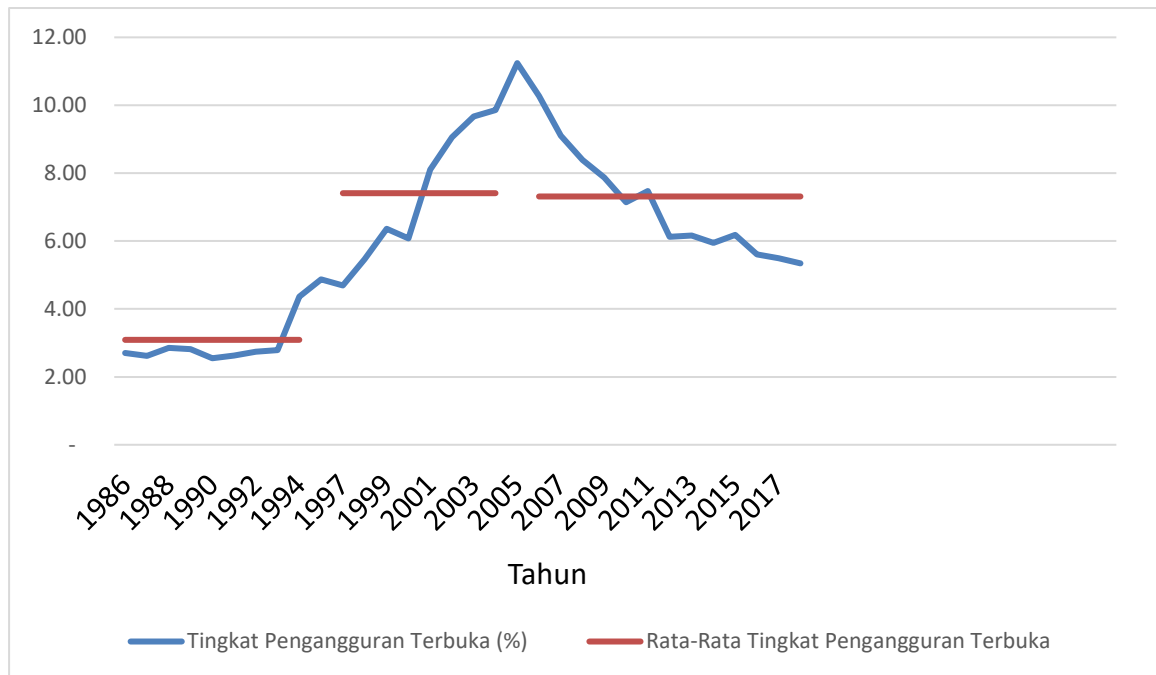
rasa pencapaian pribadi dari bekerja. Menganggur dapat dikatakan rendahnya standar hidup pada masa sekarang, mencemaskan masa depan, dan berkurangnya prestise. Dari penjelasan tersebut, diusulkan kebijakan yang akan membantu menciptakan lapangan kerja oleh kampanye yang dilakukan politisi bukanlah suatu hal yang mengherankan (Mankiw, 2016).

Determinan yang lebih nampak pada standar kehidupan suatu negara bisa dilihat dari banyaknya pengangguran yang dihadapi oleh negara tersebut. Produksi barang dan jasa ekonomi suatu negara tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang bekerja. Jika suatu negara berada pada kondisi *full employment*, yaitu suatu kondisi di mana semua orang memiliki pekerjaan, maka tingkat PDB yang lebih tinggi dapat dicapai daripada membiarkan banyak pekerjaanya menganggur (Mankiw, 2016).

Banyaknya pengangguran terjadi akibat perusahaan-perusahaan memberhentikan para pekerjaanya pada saat guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi tersebut menyebabkan para investor dari luar negeri memindahkan investasinya dari Indonesia. Hal ini menyebabkan buruknya keadaan ekonomi Indonesia, yang selanjutnya berdampak terhadap tingkat pengangguran semakin meningkat. Perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran terbuka karena jika tidak diatasi dengan segera dapat mengganggu pembangunan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018) pada gambar 1.1, tingkat pengangguran terbuka (TPT) selama 22 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tingkat pengangguran terbuka meningkat secara signifikan dalam jangka panjang pada masa krisis moneter tahun 1997, yaitu pada tahun 1996 mula-mula angka tingkat pengangguran terbuka sebesar 4.87% lalu pada tahun 2004 menjadi 9.86%. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka juga terjadi pada krisis minyak dunia tahun 2005, hanya saja dalam jangka pendek. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka setelah guncangan ekonomi mengalami peningkatan. Pada tahun 1986-1996, rata-rata tingkat pengangguran terbuka adalah 3.091%, tahun 1997-2004 meningkat menjadi 7.41%, lalu pada tahun 2005-2018 sebesar 7.31%.

Gambar 1.1
TPT (Persen) dan Rata-Rata TPT Indonesia 1986-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Walaupun tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan pada tahun 2005-2018, peringkat pilar pasar tenaga kerja Indonesia pada *Global Competitiveness Index* mengalami penurunan dari peringkat ke-82 pada tahun 2018 menjadi peringkat ke-85 pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat banyaknya tenaga kerja yang belum berpengalaman bekerja, biasanya mereka adalah lulusan baru (*fresh graduate*) dan tenaga kerja yang tidak terampil (*unskilled labour*).

Zetha dan Tambunan (2006) mengungkapkan pemerintah dapat menekan angka pengangguran (*unemployment*) dengan cara meningkatkan kualitas serta kuantitas pembangunan infrastruktur. Salah satu langkah yang tepat dilakukan pemerintah untuk menekan angka pengangguran adalah melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur diharapkan dapat menjadi roda yang menggerakkan perekonomian suatu negara khususnya di Indonesia serta memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan suatu negara. Adapun manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya pembangunan infrastruktur, yaitu dapat menciptakan penyerapan tenaga kerja (*labour*) seperti memperluas lapangan kerja dari proyek pembangunan infrastruktur serta dengan

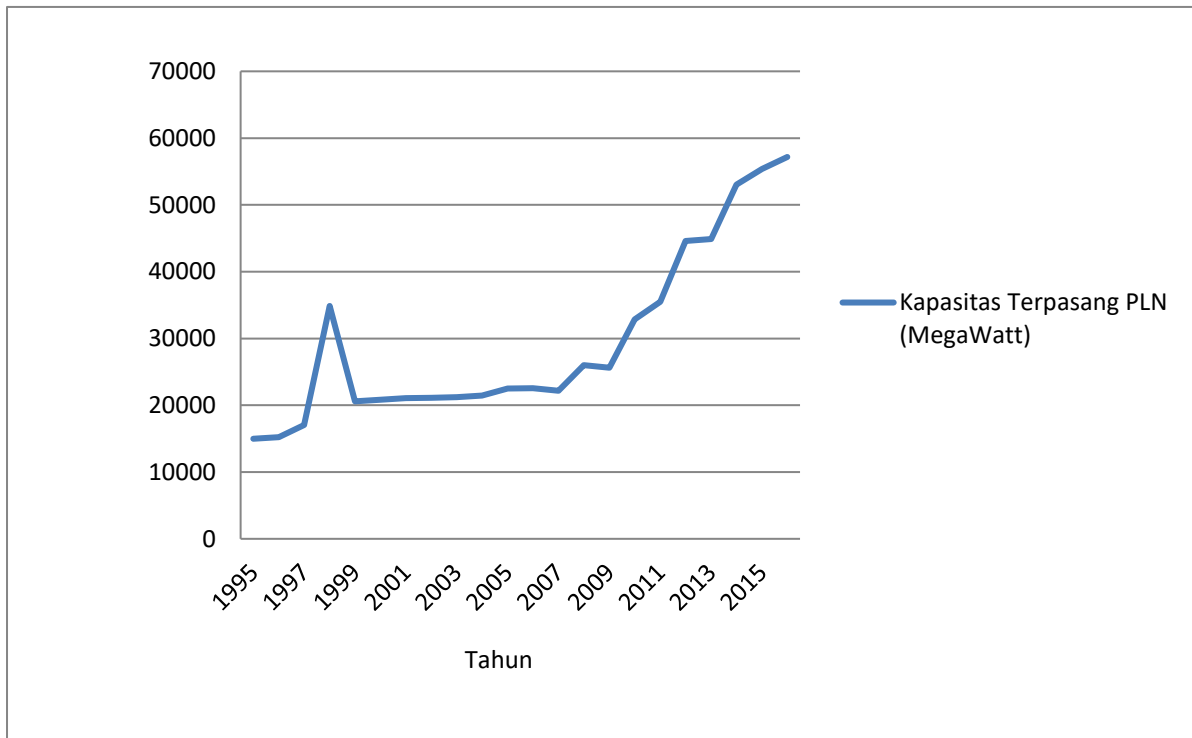
dilakukannya peningkatan pembangunan infrastruktur, investor akan tertarik untuk menanam modalnya kembali.

Dampak positif dari pembangunan itu sendiri dapat dirasakan dalam jangka pendek, seperti dapat memperluas lapangan pekerjaan serta menyerap tenaga kerja pada sector konstruksi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat mendukung kelancaran dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan dapat mendorong efisiensi serta efektivitas dari sektor-sektor ekonomi terkait dalam jangka panjang sehingga dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk kegiatan produksi barang dan jasa. Jadi, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat mendorong investor untuk menanamkan modal di Indonesia, sehingga dalam jangka panjang dapat memperluas kesempatan kerja dan menekan angka tingkat pengangguran terbuka serta dapat menyerap tenaga kerja.

Kondisi infrastruktur dijadikan tolok ukur oleh para investor guna menanamkan modal di Indonesia. Peningkatan pembangunan infrastruktur perlu dilakukan pemerintah untuk menarik investor agar mau menanamkan modal di Indonesia, sehingga menambah jumlah investasi. Dengan begitu, bertambahnya jumlah investasi akan menciptakan kesempatan kerja lebih banyak sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka dalam jangka panjang. (Zetha dan Tambunan, 2006).

Penn dan Parker (2011) menggolongkan infrastruktur atas 3 bagian besar yaitu infrastruktur struktural, transportasi, serta lingkungan dan energi. Infrastruktur struktural yang terdiri dari gedung institusi, jembatan, bendungan, tanggul dan dinding penahan banjir. Infrastruktur transportasi terdiri dari Jalan, angkutan massal (*light rail, heavy rail, commuter rail*), aviasi, saluran air, pelabuhan, terowongan, dan rel. Infrastruktur lingkungan dan energi terdiri atas energi (pembangkit energi dan distribusi energi), air minum (tempat penyimpanan dan pengolahan), air limbah (pengolahan dan pengaliran), *stormwater* (gorong-gorong), dan tempat pengolahan limbah padat dan berbahaya.

Gambar 1.2
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (MegaWatt)



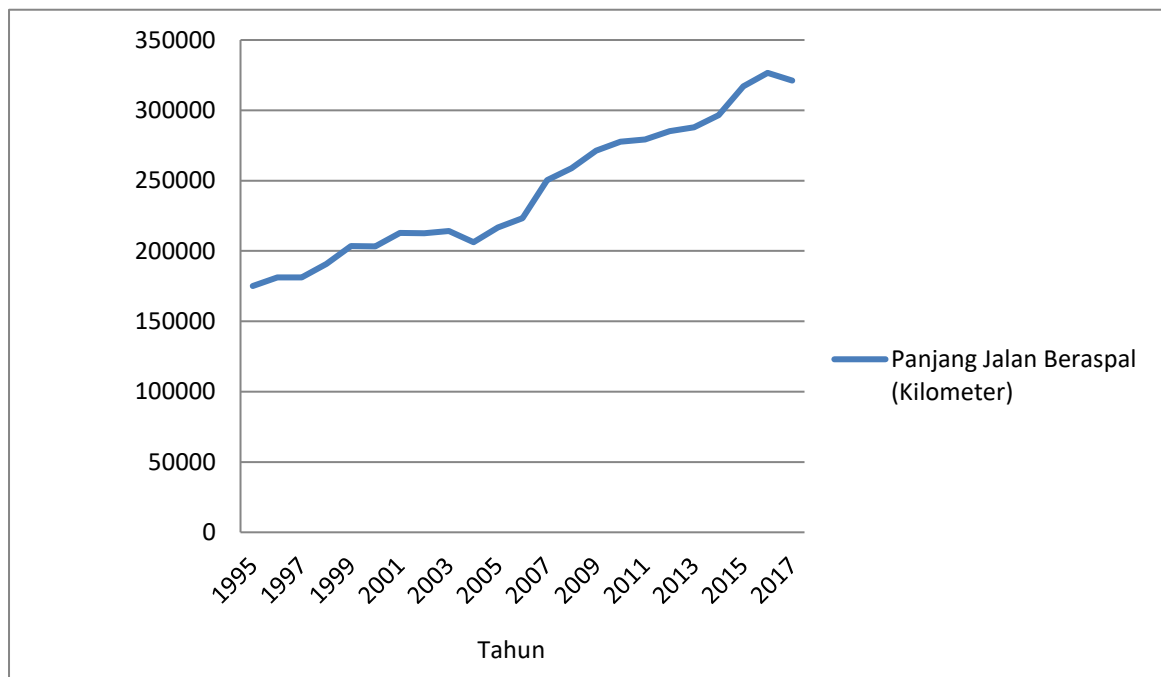
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti kapasitas terpasang pembangkit listrik dapat memperluas kesempatan kerja dan mendorong kegiatan produksi tenaga kerja. Gambar 1.2 menunjukkan pada tahun 1995-1998, BPS mencatat kapasitas listrik terpasang PLN meningkat dari 14,983 MW menjadi 34,877 MW. Lalu pada tahun 1999-2005, BPS mencatat kapasitas listrik terpasang menurun dari 20,596 MW menjadi 22,515 MW. Hal ini terjadi karena dunia sedang mengalami guncangan ekonomi sehingga para investor memindahkan investasinya dari Indonesia. Pada tahun 2006-2017, cenderung mengalami peningkatan dari 22,531 MW menjadi 571,77 MW.

Pembangunan infrastruktur ekonomi yang lain seperti pembangunan jalan bisa menjadi penunjang untuk kelancaran dan meningkatkan aktivitas ekonomi serta distribusi barang dan jasa. Meningkatnya distribusi barang dan jasa tentunya diperlukan tambahan tenaga kerja sehingga pembangunan jalan dapat memperluas lapangan kerja.

BPS (2018) mencatat, pada tahun 1995-1998, panjang jalan beraspal awalnya 175,105 kilometer lalu meningkat menjadi 190,683 kilometer. Selanjutnya, pada tahun 1999-2005, panjang jalan beraspal meningkat dari 203,499 kilometer menjadi 216,714 kilometer. Tahun 2006-2017, panjang jalan beraspal dari 223,343 kilometer meningkat menjadi 321,093 kilometer. Peningkatan panjang jalan beraspal tidak terlepas dari perbaikan ekonomi pasca guncangan ekonomi.

Gambar 1.3
Panjang Jalan Beraspal (Kilometer)

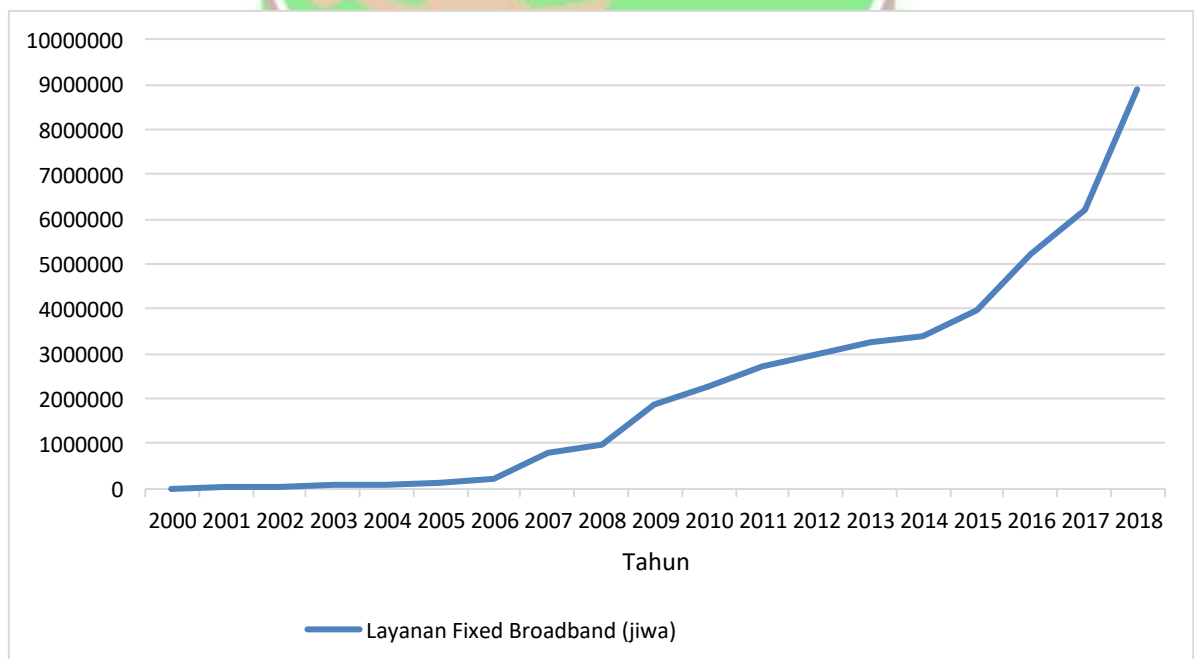
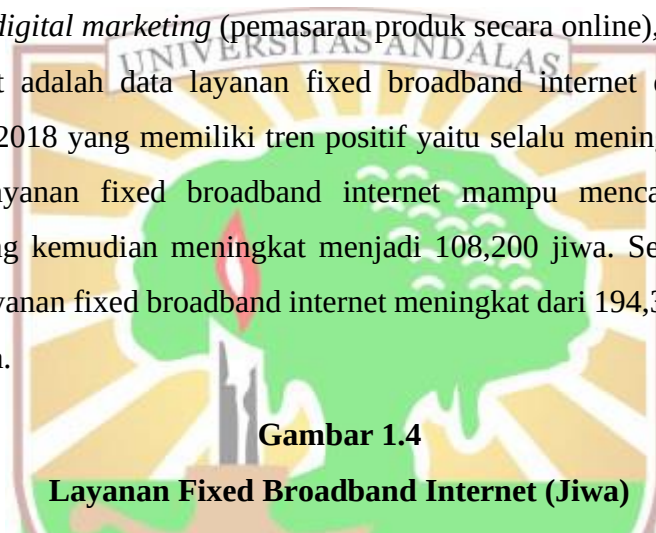


Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)

Selain itu, pada era modern seperti sekarang ini internet sangat diperlukan guna mendukung kegiatan atau aktivitas ekonomi. Masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk kegiatan jual-beli barang dan jasa secara online (*e-commerce*) yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan produksinya. Orang yang menganggur juga dapat memanfaatkan internet guna mendirikan usaha kecil-kecilan agar memiliki pendapatan. Ketika usaha kecil-kecilannya mengalami kemajuan, tentu dikarenakan adanya peningkatan permintaan terhadap barang/jasa dari usaha kecil-kecilannya tersebut. Oleh karena itu, orang tersebut tidak mungkin menjalankan usahanya itu sendiri. Dia akan

mempekerjakan tetangga, teman, dan saudaranya untuk bekerja. Usahnya tersebut bisa menyerap tenaga kerja yang ada dan membuka lapangan kerja. Orang yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan juga dapat menggunakan internet untuk mengakses informasi lowongan kerja secara online. Dengan adanya internet, para pencari kerja tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk sekedar mencari lowongan pekerjaan di perusahaan-perusahaan maupun instansi-instansi pemerintah yang jarak tempuhnya jauh dari rumah. Ditambah lagi, keberadaan internet dapat menciptakan lapangan kerja baru yang mengandalkan keahlian teknologi informasi seperti pengembang *software* dan aplikasi, desainer website, *programmer*, *digital marketing* (pemasaran produk secara online), dan lainnya.

Berikut adalah data layanan fixed broadband internet dari tahun 2000 sampai tahun 2018 yang memiliki tren positif yaitu selalu meningkat. Pada tahun 2000-2005, layanan fixed broadband internet mampu mencapai 4,000 jiwa konsumen yang kemudian meningkat menjadi 108,200 jiwa. Selanjutnya, tahun 2006-2018, layanan fixed broadband internet meningkat dari 194,367 jiwa menjadi 8,874,116 jiwa.



Sumber: International Telecommunication Union (2019)

Layanan fixed broadband internet tersebut menunjukkan seberapa banyak infrastruktur fixed broadband internet yang sudah tersedia dan mampu menjangkau penduduk di Indonesia.

Peningkatan kapasitas listrik terpasang PLN, panjang jalan beraspal, dan layanan fixed broadband internet terjadi setelah guncangan ekonomi, namun tingkat pengangguran terbuka tidak mengalami penurunan secara signifikan sehingga menimbulkan tanda tanya. Seperti halnya hasil penelitian dari Leigh et. al. (2011) berjudul dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pengangguran. Mereka menemukan bahwa pembangunan infrastruktur jalan mengalami peningkatan namun efeknya terhadap pengangguran tidak begitu besar. Penelitian yang dilakukan oleh Czernich (2014), yaitu tentang pemasangan *broadband* internet dan dampaknya terhadap pengangguran, menemukan bahwa pemasangan broadband internet memiliki pengaruh yg kecil terhadap penurunan tingkat pengangguran. George et. al. (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pemasangan daya listrik terhadap tingkat pengangguran menyatakan bahwa ketika pasokan listrik meningkat, kapasitas produksi meningkat yang mengarah pada peningkatan penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran meskipun dampaknya tidak signifikan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul:

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kapasitas terpasang pembangkit listrik terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaruh panjang jalan beraspal terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh layanan fixed broadband internet terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia?

- d. Bagaimana pengaruh kapasitas terpasang pembangkit listrik, panjang jalan beraspal, dan Layanan fixed broadband internet secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka Indonesia?

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh kapasitas terpasang pembangkit listrik terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh panjang jalan beraspal terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- c. Menganalisis layanan fixed broadband internet terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.
- d. Menganalisis kapasitas terpasang pembangkit listrik, panjang jalan beraspal, dan layanan fixed broadband internet secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia.

